



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/182/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

- Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1774);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1775);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor

- 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
 23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memproses Dokumen kependudukan serta melaksanakan tugas lainnya dari atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Tabalong.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 182 /2025
TANGGAL 15 Mei 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025




No.	Nama	Tugas
1.	Rahmat Hardianto	Operator SIAK Desa Hapalah
2.	Rahman Hakim	Operator SIAK Desa Bangkiling
3.	Jari Ahmad, S.Pd.I	Operator SIAK Desa Sungai Durian
4.	Aspihannor	Operator SIAK Desa Pematang
5.	Reydo Wahyudinnata	Operator SIAK Desa Hariang
6.	Saifullah	Operator SIAK Desa Banua Lawas
7.	Taberi	Operator SIAK Desa Habau
8.	Bijuri	Operator SIAK Desa Banua Rantau
9.	Muhammad Fauzi	Operator SIAK Desa Purai
10.	Nabhan	Operator SIAK Desa Batang Banyu
11.	Hayani	Operator SIAK Desa Habau Hulu
12.	Mila Wati	Operator SIAK Desa Bungin
13.	M. Riyadi	Operator SIAK Desa Bangkiling Raya
14.	Burjani	Operator SIAK Desa Talan
15.	Pahriah	Operator SIAK Desa Sungai Anyar
16.	Maya	Operator SIAK Kelurahan Pulau
17.	Sujida Nazmillah	Operator SIAK Desa Ampukung
18.	Muhammad Wahyudinoor Fitriadi	Operator SIAK Desa Telaga Itar
19.	Salman Al Madani	Operator SIAK Desa Sungai Buluh
20.	Hendra	Operator SIAK Desa Binturu
21.	Rifka Hastuti	Operator SIAK Desa Pudak Setegal
22.	Lydiana Rahmah	Operator SIAK Desa Pasar Panas
23.	Muhammad Misriadi, S.Pd	Operator SIAK Desa Masintan
24.	Siska Marlina	Operator SIAK Desa Takulat
25.	Malinda Malini	Operator SIAK Desa Paliat
26.	Irhadi	Operator SIAK Desa Karang Putih
27.	Zainal Hakim	Operator SIAK Desa Bahungin
28.	Kiptiah	Operator SIAK Desa Padangin




No.	Nama	Tugas
30.	Jainor Sulaiman	Operator SIAK Desa Tanta Hulu
31.	Arbani	Operator SIAK Desa Murung Baru
32.	Hirdinansyah	Operator SIAK Desa Luk Bayur
33.	Aan Syafi'i	Operator SIAK Desa Walangkir
34.	Julianus	Operator SIAK Desa Warukin
35.	Anita Ariani	Operator SIAK Desa Barimbun
36.	Widiarti	Operator SIAK Desa Mangkusip
37.	Hariati	Operator SIAK Desa Pamarangan Kanan
38.	Pajri	Operator SIAK Desa Pulau Ku,u
39.	Husni	Operator SIAK Desa Tanta
40.	Nurhani	Operator SIAK Desa Padang Panjang
41.	Mahdianor	Operator SIAK Desa Puain Kanan
42.	Gazali Rahman	Operator SIAK Kelurahan Tanjung
43.	Mia Audina	Operator SIAK Kelurahan Agung
44.	Rustam	Operator SIAK Desa Banyu Tajun
45.	Muhammad Fahmi	Operator SIAK Desa Pamarangan Kiwa
46.	Zainudin	Operator SIAK Desa Puain Kiwa
47.	Sukran, S. Kom	Operator SIAK Desa Juai
48.	Hepni Eryadi	Operator SIAK Desa Mahe Seberang
49.	Devie Herwinda, S.AP	Operator SIAK Desa Kambitin
50.	Lola Alfiana, S.AP	Operator SIAK Desa Wayau
51.	Abdul Rasyid	Operator SIAK Desa Garunggung
52.	Junaidi, S.AP	Operator SIAK Desa Kitang
53.	Mawarni	Operator SIAK Desa Sungai Pimping
54.	Ahmad Humaidi	Operator SIAK Desa Kambitin Raya
55.	Muhammad Husain	Operator SIAK Desa Marindi
56.	Eka Wahyuni	Operator SIAK Desa Wirang
57.	Irwan Saputra	Operator SIAK Desa Bongkang
58.	Farida, S.AP	Operator SIAK Desa Nawin
59.	Muhamad Yamani	Operator SIAK Desa Halong
60.	Agus Setiawan	Operator SIAK Desa Hayup
61.	Ahmad Firdaus	Operator SIAK Desa Kembangkuning
62.	Novi Alfiani Kasanah	Operator SIAK Desa Seradang

No.	Nama	Tugas
63.	Norjanah	Operator SIAK Desa Mahe Pasar
64.	Yuliana	Operator SIAK Desa Lok Batu
65.	Nor Maya Sari	Operator SIAK Desa Suput
66.	Jaliansyah	Operator SIAK Desa Suriyan
67.	Sagimin	Operator SIAK Desa Catur Karya
68.	Erni Hernita	Operator SIAK Kelurahan Belimbing Raya
69.	Dewi Kurina	Operator SIAK Kelurahan Belimbing
70.	Zainudin	Operator SIAK Kelurahan Mabuun
71.	Norliana	Operator SIAK Desa Kapar
72.	Mahmud Ahmad Badria	Operator SIAK Desa Masukau
73.	Faizal Ikhfan Annaas	Operator SIAK Desa Kasiau Raya
74.	Erwin Sahendra	Operator SIAK Desa Kupang Nunding
75.	Katwanto	Operator SIAK Desa Mangkupum
76.	Siti Hasanah	Operator SIAK Desa Pasar Batu
77.	Eko Widiyastianto	Operator SIAK Desa Uwie
78.	Misli Susanti	Operator SIAK Desa Muara Uya
79.	Herliani	Operator SIAK Desa Lumbang
80.	Andi Nasrullah	Operator SIAK Desa Santuun
81.	M. Didi Irawan	Operator SIAK Desa Simpung Layung
82.	Irwan	Operator SIAK Desa Binjai
83.	Erni Hariati	Operator SIAK Desa Palapi
84.	Supia Aripani	Operator SIAK Desa Kampung Baru
85.	Siti Alfiah	Operator SIAK Desa Salikung
86.	Muhajir	Operator SIAK Desa Ribang
87.	Sarikin	Operator SIAK Desa Sungai Kumap
88.	Rusdinsyah	Operator SIAK Desa Madang
89.	Elsa Hermayanti	Operator SIAK Desa Tantaringin
90.	Akhmad Riza Wahidi, S.Pd	Operator SIAK Desa Murung Karang
91.	Najeri	Operator SIAK Desa Padangin
92.	Eka Iswin Rohmayanti, S.P.	Operator SIAK Desa Manduin
93.	Hariyanti	Operator SIAK Desa Mantuil
94.	Azwar Rijali	Operator SIAK Desa Harus
95.	Hermawansyah	Operator SIAK Desa Pugaan

No.	Nama	Tugas
96.	Budiya Rahman	Operator SIAK Desa Pampanan
97.	Liana Ernana, S.sos	Operator SIAK Desa Sungai Rukam II
98.	Muhammad Hairudin Mahfuz	Operator SIAK Desa Sungai Rukam I
99.	Daud Yahya S.sos	Operator SIAK Desa Jirak
100.	Fadillah	Operator SIAK Desa Halangan
101.	Markati	Operator SIAK Desa Tamunti
102.	Lisna Wati	Operator SIAK Desa Bilas
103.	Dadiansyah	Operator SIAK Desa Kaong
104.	Novitalia Desiari	Operator SIAK Desa Kinarum
105.	Andis Sukma	Operator SIAK Desa Masingai II
106.	Achmad Abdul Shokkeh, S.AB	Operator SIAK Desa Masingai I
107.	M. Didi Wardana	Operator SIAK Desa Teratau
108.	Adi Sastra Wahyuni	Operator SIAK Desa Namun
109.	Norianto	Operator SIAK Desa Jaro
110.	Ani Muslimah	Operator SIAK Desa Solan
111.	Fajri Rahman	Operator SIAK Desa Muang
112.	Bayu Syahdani	Operator SIAK Desa Lano
113.	Syaipullah	Operator SIAK Desa Purui
114.	Norliana	Operator SIAK Desa Garagata
115.	Kariyana Putri Utama	Operator SIAK Desa Nalui
116.	Siti Hairiah	Operator SIAK Desa Waling
117.	Wanty Ayu Wulandari	Operator SIAK Desa Usih
118.	Mahyudin	Operator SIAK Desa Bintang Ara
119.	Siti Maisaroh	Operator SIAK Desa Argo Mulyo
120.	Solikin	Operator SIAK Desa Bumi Makmur
121.	Muhammad Rasyid	Operator SIAK Desa Hegar Manah
122.	Muhammad Abdillah	Operator SIAK Desa Maburai
123.	Nani Yuli Astuti	Operator SIAK Desa Kasiau

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI